



JURNAL ILMU HUKUM

# LITIGASI

ISSN : 0853 - 7100

Hal 35 (Aslan Noor)

**"HOLDING GAME", MERGER DAN  
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA**

**OTONOMI DAERAH DAN SIGNIFIKANSINYA  
DENGAN PERSAINGAN BEBAS**

**PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN**

**TELAAH KRITIS ATAS PERUNDANGAN NOMOR 36 TAHUN 2005  
MENURUT BEBERAPA ASPEK DAN KONSEP  
KEPERUSAHAAN**

**KAJIAN HUKUM TENTANG PERENCANAAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN ALAM**

**KONSERVASI WILAYAH PERENCANAAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN ALAM  
DI PANGKALAN JENDERAL SOEDIRMO KABUPATEN KARANGASEM  
BARAT**

**KONTRIBUSI PERENCANAAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN ALAM  
TERHADAP PERENCANAAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN ALAM**

**PERLINDUNGAN TERHADAP HUKUM ADAT YANG BEKERJA MENURUT  
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN**

**TANTANGAN GLOBALISASI :  
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA**

**TELAAH KRITIS ATAS EKISTENSI  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)**

TELAAH KRITIS ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005  
MENURUT PERSPEKTIF NEGARA, HAM, DAN KONSEP  
KEPEMILIKAN TANAH DI INDONESIA

Oleh :

Aslan Noor<sup>1</sup>

---

*Abstract*

*Regulation of President Number 36 Of 2005 aim to arrange government how deservedly mechanism of prosedural which must obey for the implementation of levying of land; ground as place of development areal for the sake of public, loaded with individual rights payload of land;ground which is very have an effect on materially and immaterial to life of its owner right from the secondhand before, and moment of after liberation of land.*

*In Fact, many in every project place of levying of land impressing only not satisfied to compensation . Whereas development areal which luxury so ought to can be secure and prosperous of people, on the contrary around project including former owner right which follow big share because have volunteer discharged its rights, instead fall miserably. As to effect unable to adapt and competition to changes that happened at areal. Ironic it is true, but there is no help for it, government or project executor more see to progress in one party, but the other party retreating.*

Kata kunci : Tanah, pembangunan, kepentingan, umum, kepemilikan, hak, pelepasan.

---

**A. PENDAHULUAN**

Demo masyarakat dari berbagai kalangan, seperti : mahasiswa, kaum selebritis, petani dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) larut dalam suasana menentang pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bahkan, dalam pemaparan orasinya terkesan brutal atau bringas layaknya bahasa seorang preman. Kaum cendekiawan yang bernaung di bawah bendera LSM dan beberapa Ornop lainnya seperti : *Urban Poor Consortium (UPC)*, *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)*, *Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*

(LBHI), *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)* pun tidak mau ketinggalan dan sangat aktif dalam mengadakan acara-acara seminar, semiloka, diskusi-diskusi atau yang dipersamakan dengan itu dalam suatu aksi penolakan yang diskretif (kebablasan) dan diskonstruktif terhadap perpres tersebut. Pokoknya, pro-kontra atau silang pendapat bermunculan dan tertuju pada permasalahan yang antara lain adalah minim atau tidak diadakannya terlebih dahulu konsultasi publik, akan tetapi pemerintah malah menawarkan sosialisasi terhadap konsep substansial Perpres No. 36 Tahun 2005 tersebut, yang sebelumnya sudah ditandatangani Presiden Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Unpas.